

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

Anggaran 5% untuk Kelurahan Sudah Diberlakukan

JAKARTA - Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar lima persen untuk operasional kelurahan sudah dijalankan Provinsi Jakarta.

“Sebenarnya Jakarta sudah dilaksanakan melalui sektor samping, seksi-seksi di kelurahan. Ada air, Bina Marga, sosial dan taman. Jadi, sebenarnya sudah dilaksanakan,” kata Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Senin.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, menyampaikan kelurahan di Jakarta mendapatkan dana APBD paling sedikit lima persen. Ini terkandung dalam Un-

dang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

Heru melanjutkan, untuk anggaran perbaikan jalan di kelurahan sudah dialokasikan di Dinas Bina Marga Jakarta, anggaran jaminan sosial melalui Dinas Sosial Jakarta dan pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak melalui kelurahan masing-masing.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan perbedaan antara dana operasional kelurahan dan dana desa terdapat di bagian pengelolaannya. Menurutnya, untuk dana desa langsung dikelola oleh kepala desa. Kalau di Jakarta, lurah adalah bagian dari struktur organisasi, struktural perangkat daerah. Kalau

desa, pemerintahan sendiri.

Pemprov Jakarta sebelumnya berencana melakukan sosialisasi pengalokasian APBD sebesar lima persen untuk operasional kelurahan bulan Mei.

“Informasi yang kami dapatkan dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri akan ada sosialisasi awal Mei 2024,” kata Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jakarta, Sigit Wijatmoko.

Perihal besaran lima persen itu bertujuan untuk memperkuat kelurahan sebagai wilayah ujung tombak. Kelurahan menyelesaikan berbagai persoalan yang terlihat kecil di lapangan, tetapi berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat banyak.

Namun, dana APBD minimal lima persen itu setelah dikurangi oleh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. APBD Jakarta tahun ini sebesar 81,7 triliun. Sebelumnya, Sihit Wijatmoko mengungkapkan, Pemprov Jakarta belum memiliki gambaran jelas terkait pengalokasian lima persen APBD untuk kelurahan. Sebab Pemprov tidak dilibatkan dalam pembahasan di DPR soal pengalokasian anggaran itu.

Pembahasan hanya melibatkan Kemendagri, Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Karena itu dengan adanya sosialisasi, Pemprov Jakarta akan mendapatkan gambaran yang utuh dari sisi pemerintah melalui Kemendagri. “Kemarin kami juga sudah mengusulkan agar pimpinan dan anggota DPRD ikut dalam sosialisasi oleh Kemendagri,” ujar Sigit.

Selain itu, terkait pelaksanaan dan lamanya sosialisasi juga tergantung pada Kemendagri. Sigit berharap sosialisasi nantinya berlangsung tatap muka agar lebih komunikatif. ■ **Ant/G-1**